

Demokrasi Parlemen Wanita Terhadap FDI Di Indonesia

Zahria Harum Prasetiati^{1*} & Trian Gigih Kuncoro²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kota Surakarta, Indonesia

Jl. A. Yani No. 157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57169

*e-mail: zahriaharum.prasetiati@gmail.com

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

16 May 2026

Revised :

20 May 2026

Accepted :

24 May 2026

Kata Kunci :

Demokrasi, Foreign Direct Investment, Keterwakilan Perempuan, Faktor Ekonomi

Keywords :

Democracy, Foreign Direct Investment, Women's Representation, Economic Factors

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Foreign Direct Investment (FDI) sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, serta masih adanya perdebatan mengenai pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap arus investasi asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh demokrasi, keterwakilan perempuan dalam politik, dan faktor ekonomi terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Variabel independen yang digunakan meliputi indeks demokrasi, kepemimpinan perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertambangan, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum provinsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel serta metode estimasi Random Effect Model (REM) sebagai model terbaik berdasarkan uji pemilihan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel demokrasi, kepemimpinan perempuan, dan keterwakilan perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap FDI. Sebaliknya, variabel ekonomi memiliki pengaruh yang lebih kuat. PDRB sektor pertambangan dan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan. Secara simultan, seluruh variabel dalam model berpengaruh signifikan terhadap FDI, meskipun nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain di luar model yang memengaruhi investasi asing. Temuan ini menegaskan bahwa stabilitas dan kekuatan fundamental ekonomi lebih menjadi pertimbangan utama investor dibandingkan faktor representasi politik dalam menarik arus investasi asing.

Women's Parliamentary Democracy Against FDI in Indonesia

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of Foreign Direct Investment (FDI) as a source of development financing and a driver of regional economic growth in Indonesia, as well as the ongoing debate regarding the influence of political and economic factors on foreign investment flows. This study aims to analyze the influence of democracy, women's representation in politics, and economic factors on Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia. The

independent variables used include the democracy index, women's leadership, women's representation in parliament, Gross Regional Domestic Product (GRDP) in the mining sector, the open unemployment rate, and the provincial minimum wage. This study uses a quantitative approach with panel data and the Random Effect Model (REM) estimation method as the best model based on the model selection test. The results show that the variables of democracy, women's leadership, and women's representation do not have a significant effect on FDI. In contrast, economic variables have a stronger influence. GRDP in the mining sector and the provincial minimum wage have a positive and significant effect on FDI, while the open unemployment rate has a negative and significant effect. Simultaneously, all variables in the model have a significant effect on FDI, although the coefficient of determination indicates that there are still other factors outside the model that influence foreign investment. This finding confirms that the stability and strength of economic fundamentals are more important considerations for investors than political representation in attracting foreign investment flows.

PENDAHULUAN

FDI (*Foreign Direct Investment*) adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing (individu, perusahaan, lembaga) ke dalam perusahaan atau proyek di suatu negara dengan tujuan memperoleh kendali jangka panjang atas aktivitas usaha tersebut (Putriyanti, 2022) FDI biasanya berbentuk pendirian pabrik/kantor baru (*greenfield*), akuisisi atau merger dengan perusahaan lokal, atau penambahan modal pada perusahaan yang sudah ada, dan berbeda dari investasi portofolio karena disertai keterlibatan manajerial, transfer teknologi, dan orientasi jangka panjang, bukan sekadar membeli saham untuk mencari *capital gain* jangka pendek.

Meskipun arus *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, distribusinya masih belum merata antar daerah. Sebagian besar investasi asing masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan sumber daya alam, infrastruktur, serta akses pasar yang lebih baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Investasi/BKPM, provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur cenderung menerima porsi FDI yang jauh lebih besar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa aliran FDI tidak tersebar secara merata dan masih terdapat kesenjangan investasi antar wilayah. Ketimpangan distribusi investasi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah serta menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang memengaruhi keputusan investor asing dalam menentukan lokasi investasi (Septiantoro et al., 2020).



Sumber: Kementerian Investasi/BPKM, (2022).

Gambar 1. Distribusi FDI Menurut Provinsi di Indonesia

Keputusan investor asing dalam menanamkan modal di suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ekonomi, tetapi juga oleh berbagai faktor institusional dan politik (Effendi & Ratnasari, 2018). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti stabilitas politik, kualitas demokrasi, kepastian hukum, serta efektivitas kebijakan pemerintah dapat memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap suatu negara. Selain itu, faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat upah tenaga kerja, dan kondisi pasar domestik juga menjadi pertimbangan penting dalam menarik arus investasi asing (Kartasasmita, 2025). Dalam konteks ini, kualitas demokrasi dan representasi politik, termasuk keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, dapat mencerminkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya dapat memengaruhi iklim investasi dan keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya. (Kartasasmita, 2025).

Demokrasi sebagai sistem politik menempatkan rakyat sebagai pemilik sekaligus sumber kekuasaan tertinggi. Prinsip ini diwujudkan melalui serangkaian mekanisme yang saling menguatkan. Pertama, pemilihan umum yang bebas dan adil menjadi sarana utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya, sekaligus menjadi mekanisme pergantian kekuasaan secara teratur dan damai. Namun, pemilu saja tidak cukup. Demokrasi juga memerlukan jaminan kebebasan berpendapat agar warga negara dapat menyuarakan aspirasi, mengkritik kebijakan publik, dan terlibat dalam diskursus secara terbuka. Tanpa kebebasan ini, pemilu hanya menjadi prosedur kosong tanpa makna partisipasi yang sesungguhnya (Gaffar, 2013). Selain itu, pembagian kekuasaan antar lembaga negara serta mekanisme pengawasan (*checks and balances*) diperlukan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang dapat melahirkan penyalahgunaan wewenang. Ketiga mekanisme ini pemilu yang adil, kebebasan berpendapat, dan pengawasan kekuasaan merupakan fondasi minimal bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis (Abdullah, 2022).

Dalam demokrasi yang berfungsi dengan baik, akuntabilitas pemerintah menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga dalam setiap kebijakan yang berdampak pada kehidupan rakyat. Akuntabilitas ini hanya mungkin terwujud jika terdapat ruang publik yang terbuka bagi kritik dan koreksi. Kebijakan yang keliru harus dapat diuji melalui saluran-

saluran yang tersedia, baik melalui lembaga perwakilan, pers, maupun gerakan masyarakat sipil (Winahyu & Reskiputri, 2023). Di sinilah perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berserikat, kebebasan pers, dan kebebasan berorganisasi memegang peran krusial. Kebebasan pers berfungsi sebagai *watchdog* yang mengawasi jalannya pemerintahan, sementara kebebasan berserikat memungkinkan masyarakat membentuk organisasi yang memperjuangkan kepentingan kolektif mereka. Tanpa perlindungan terhadap hak-hak ini, demokrasi akan kehilangan ruhnya dan berubah menjadi formalitas prosedural yang tidak bermakna bagi rakyat.

Pada hakikatnya, demokrasi bukan sekadar soal penyelenggaraan pemilu yang berlangsung setiap lima tahun. Lebih dari itu, demokrasi menuntut kualitas institusi politik dan hukum yang menjamin tegaknya *rule of law* di mana setiap warga negara, termasuk penguasa, tunduk pada hukum yang sama tanpa kecuali. Prinsip perlindungan terhadap hak-hak minoritas juga menjadi ciri penting demokrasi substantif, karena suara kelompok minoritas tidak boleh ditelan oleh kepentingan mayoritas. Terakhir, demokrasi memerlukan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar partisipasi seremonial (Abdullah, 2022). Partisipasi yang bermakna berarti masyarakat dilibatkan sejak perumusan kebijakan, diberi akses terhadap informasi yang memadai, serta memiliki saluran untuk menyampaikan keberatan jika kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, demokrasi merupakan sistem yang kompleks dan multidimensional, di mana pemilu hanyalah salah satu elemen dari ekosistem yang lebih luas sebuah sistem yang hanya akan berfungsi optimal jika institusi politik dan hukumnya kuat, hak-hak dasarnya terlindungi, dan rakyatnya terlibat secara aktif dan bermakna.

Banyak studi menunjukkan bahwa peningkatan kehadiran perempuan di parlemen berkorelasi positif dengan kualitas tata kelola, termasuk penurunan korupsi dan peningkatan perhatian pada isu kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan. Secara empiris, penelitian lintas negara menemukan bahwa kenaikan 10 poin persentase kursi parlemen yang dipegang perempuan dapat meningkatkan pertumbuhan PDB sekitar 0,4-0,7 poin persentase, antara lain melalui perbaikan institusi dan kebijakan publik yang lebih inklusif. Hubungan teoritis antara demokrasi yang mendukung perempuan dan FDI dapat dirangkum sebagai hubungan yang melalui kualitas institusi. Representasi perempuan di parlemen berpotensi meningkatkan kualitas pemerintahan, memperbaiki kebijakan anti-korupsi, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan akuntabilitas semua ini sangat penting bagi masuknya FDI. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa efek ini tidak selalu bersifat linear dan universal, sehingga konteks institusional, tingkat demokrasi, dan kualitas kebijakan tetap menjadi faktor penentu apakah demokrasi yang mendukung perempuan benar-benar dapat diterjemahkan menjadi arus FDI yang lebih besar (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021).

Teori kepemimpinan wanita menekankan bahwa perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang cenderung partisipatif, kolaboratif, dan komunikatif. Berbeda dengan gaya kepemimpinan tradisional yang sering diasosiasikan dengan pendekatan otoriter dan hierarkis, kepemimpinan perempuan lebih banyak mengedepankan empati, kerja sama tim, serta kemampuan membangun relasi interpersonal. Dalam konteks pembangunan dan organisasi publik, pendekatan ini dinilai mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena melibatkan berbagai perspektif (Alisy et al., 2024).

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas demokrasi dan keterwakilan perempuan dalam politik memiliki keterkaitan dengan iklim investasi dan kualitas tata kelola

pemerintahan. Demokrasi yang didukung institusi politik yang kuat, kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas pemerintahan mampu meningkatkan kepercayaan investor asing karena dapat menurunkan risiko ketidakpastian kebijakan dan korupsi. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam lembaga politik dipandang sebagai indikator demokrasi substantif yang mencerminkan adanya kesetaraan hak dan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan publik. Kehadiran perempuan di parlemen juga berpotensi mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan tenaga kerja (Olivia & Nuraeni, 2024). Kondisi institusional yang lebih stabil dan inklusif tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan daya tarik suatu negara atau daerah bagi investor asing.

Teori gender dan demokrasi menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam sistem politik tidak hanya berkaitan dengan representasi simbolik, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tata kelola pemerintahan. (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021) menjelaskan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik dapat memperkuat pembangunan sosial dan kelembagaan. Dalam konteks investasi asing, keberadaan pemimpin perempuan maupun meningkatnya representasi perempuan di legislatif diperkirakan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan publik sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Namun demikian, pengaruh demokrasi dan representasi perempuan terhadap Foreign Direct Investment (FDI) masih menunjukkan hasil yang beragam karena sangat dipengaruhi oleh kondisi institusional, stabilitas politik, dan kualitas kebijakan di masing-masing wilayah.

Di sisi lain, investor asing juga mempertimbangkan faktor fundamental ekonomi dalam menentukan lokasi investasi. Variabel seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertambangan, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum provinsi mencerminkan kapasitas ekonomi daerah, kondisi pasar tenaga kerja, serta biaya produksi yang dapat memengaruhi keputusan investasi. Putriyanti (2022) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan potensi sumber daya daerah menjadi faktor penting yang memengaruhi arus investasi asing langsung di Indonesia. Penelitian (Septiantoro et al., 2020) juga menemukan bahwa kualitas institusi dan faktor ekonomi secara simultan memengaruhi arus FDI. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh demokrasi, kepemimpinan perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen, serta faktor ekonomi terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia menggunakan pendekatan data panel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel untuk menganalisis pengaruh Demokrasi, Parlemen Wanita, terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia.

$$FDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 DEM_{it} + \beta_2 LEG_{it} + \beta_3 PW_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + \beta_5 TPT_{it} + \beta_6 UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel untuk menganalisis pengaruh demokrasi, keterwakilan perempuan, dan faktor ekonomi terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Persamaan regresi data panel menjelaskan bahwa FDI_{it} merupakan Foreign Direct Investment pada wilayah i dan periode waktu t , dengan β_0 sebagai konstanta dan β_1 – β_6 sebagai koefisien regresi masing-masing variabel independen. Variabel independen yang digunakan meliputi indeks demokrasi DEM_{it} , keterwakilan perempuan di legislatif LEG_{it} , kepemimpinan perempuan PW_{it} , Produk Domestik Regional Bruto sektor pertambangan $PDRB_{it}$, tingkat pengangguran terbuka

TPT_{it} , dan upah minimum provinsi UMP_{it} , sedangkan ε_{it} merupakan error term yang mencerminkan faktor lain di luar model. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan investasi nasional, serta publikasi lembaga terkait lainnya dengan jumlah observasi sebanyak 329. Variabel dependen berupa FDI diukur berdasarkan nilai investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia dalam satuan juta dolar Amerika Serikat, sementara indeks demokrasi diukur berdasarkan kualitas kebebasan sipil, hak politik, dan kelembagaan demokrasi. Keterwakilan perempuan di parlemen diukur berdasarkan persentase anggota legislatif perempuan terhadap total anggota legislatif, sedangkan kepemimpinan perempuan menggunakan variabel dummy yang menunjukkan keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan data panel dengan unit analisis berupa 33 provinsi di Indonesia selama periode 2014–2023 sehingga menghasilkan 329 observasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Foreign Direct Investment (FDI), sedangkan variabel independennya meliputi indeks demokrasi, keterwakilan perempuan di legislatif, kepemimpinan perempuan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertambangan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan upah minimum provinsi (UMP). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi investasi nasional, dan sumber resmi lainnya.

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow digunakan untuk memilih model terbaik antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM), sedangkan Uji Hausman digunakan untuk menentukan pilihan antara FEM dan Random Effect Model (REM). Selanjutnya, Uji LM digunakan untuk membandingkan CEM dengan REM. Berdasarkan hasil pengujian, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Selain itu, penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan model regresi memenuhi kriteria estimasi yang baik dan menghasilkan kesimpulan yang valid.

Tahapan analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode regresi data panel untuk menganalisis pengaruh demokrasi, keterwakilan perempuan, dan faktor ekonomi terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Pemilihan model dilakukan melalui Uji Chow untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM), Uji Hausman untuk memilih antara FEM dan Random Effect Model (REM), serta Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk membandingkan CEM dan REM. Berdasarkan hasil pengujian, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM) karena dinilai paling sesuai dalam menjelaskan hubungan antarvariabel dalam data panel.

Selain pemilihan model, penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan model regresi menghasilkan estimasi yang baik dan tidak bias. Setelah model terbaik diperoleh, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap FDI serta uji F untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan. Selanjutnya, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan pendekatan statistik kuantitatif berbasis data panel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Estimasi Data Panel

Variabel	CEM	FEM	REM
C	162.6621	365.5777	70.45448
Pemimpin Wanita (PDW)	-1586.352	-280.6987	-621.5697
Indeks Demokrasi (ID)	-5.487441	6.406763	4.618982
Legislatif Perempuan (LPR)	29.91304	20.65995	22.01799
Upah Minimum Provinsi (UMP)	-0.000127	0.0000355	-0.0000388
TPT	57.43827	-126.3551	-65.44175
PDRB	0.001596	0.000899	0.001435
PDRB Pertambangan (PDRBP)	-0.000645	-0.001973	-0.001420
R ²	0.537971	0.810233	0.192905
Adjusted R ²	0.527927	0.784713	0.175360
Statistik F	53.56089	31.74845	10.99455
Prob. Statistik F	0.000000	0.000000	0.000000
Uji Pemilihan Model			
Uji Chow			
Cross-section F = 19.841447			
Prob. F = 0.0000			
Uji Hausman			
Chi-Square = 5.751944			
Prob. Chi-Square = 0.4515			
Sumber: Hasil olah data.			

Sumber: Olah data sekunder, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, diperoleh nilai probabilitas Uji Chow sebesar 0,0000 sehingga Fixed Effect Model (FEM) lebih baik dibandingkan Common Effect Model (CEM). Selanjutnya, hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,4515 atau lebih besar dari 0,05, sehingga model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Oleh karena itu, interpretasi hasil regresi dalam penelitian ini menggunakan hasil estimasi REM. Berdasarkan hasil estimasi REM, variabel Pemimpin Daerah Wanita (PDW) memiliki koefisien sebesar -621,5697 yang menunjukkan bahwa peningkatan kepemimpinan perempuan cenderung menurunkan Foreign Direct Investment (FDI). Variabel Indeks Demokrasi (ID) dan Legislatif Perempuan (LPR) memiliki koefisien positif masing-masing sebesar 4,618982 dan 22,01799, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas demokrasi dan keterwakilan perempuan di legislatif cenderung meningkatkan FDI.

Sementara itu, variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan PDRB sektor pertambangan memiliki koefisien negatif terhadap FDI. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan variabel-variabel tersebut cenderung menurunkan arus investasi asing langsung di Indonesia. Di sisi lain, variabel PDRB memiliki koefisien positif terhadap FDI yang mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah dapat mendorong masuknya investasi asing. Nilai R² sebesar 0,192905 menunjukkan bahwa sebesar 19,29% variasi FDI dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Selain itu, nilai Probabilitas F-statistic sebesar 0,000000 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap FDI.

Evaluasi Model dan *Goodness of Fit*

Kekuatan model dalam penelitian ini tergolong terbatas karena nilai *Adjusted R-squared* hanya sekitar 0,086, yang berarti model hanya mampu menjelaskan kurang lebih 8,6% variasi FDI berdasarkan variabel-variabel independen yang digunakan. Dengan kata lain, porsi terbesar variasi FDI justru dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, sehingga kemampuan prediktif dan daya jelaskan model terhadap dinamika FDI masih relatif lemah. Meskipun demikian, nilai *Prob F-statistic* yang sangat kecil menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel ekonomi dan politik yang dimasukkan tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDI, sehingga model masih layak digunakan sebagai dasar analisis awal.

Kemampuan penjelasan variabel juga tidak merata, karena hanya sebagian faktor ekonomi yang terbukti signifikan secara statistik, sementara variabel demokrasi, keterwakilan perempuan, dan pemimpin perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap FDI. PDRB pertambahan dan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga ketiga variabel ini menjadi kontributor utama dalam menjelaskan variasi FDI dalam model. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur model secara keseluruhan lemah dari sisi *R-squared*, variabel-variabel ekonomi tertentu tetap memberikan informasi yang berarti mengenai perilaku FDI dan dapat dijadikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih terarah (Engelica et al., 2025)

Pembahasan

Gambaran Umum *Foreign Direct Investment* (FDI) dan Variabel Penelitian

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari suatu negara ke negara lain dalam bentuk pendirian usaha baru, akuisisi perusahaan yang sudah ada, atau pembentukan joint venture dengan tujuan memperoleh kendali manajerial dan keuntungan jangka panjang. FDI tidak hanya membawa aliran modal, tetapi juga transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan integrasi ekonomi domestik ke dalam rantai pasok global. Daya tarik suatu negara terhadap FDI sangat dipengaruhi oleh faktor stabilitas politik, kualitas regulasi, perlindungan hak kepemilikan, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia (Ningsih, 2024).

Dalam penelitian ini, FDI dijadikan variabel dependen yang dipengaruhi oleh beberapa variabel penjelas yang mencerminkan aspek politik, institusional, dan ekonomi. Dari sisi politik dan institusi, variabel utama yang digunakan adalah tingkat keterwakilan perempuan di parlemen dan indeks demokrasi yang merefleksikan kualitas demokrasi dan tata kelola di suatu negara atau daerah. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dipandang sebagai indikator demokrasi substantif yang berpotensi meningkatkan transparansi, responsivitas kebijakan, serta komitmen terhadap isu keadilan sosial dan non-diskriminasi, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi persepsi investor asing.

Pengaruh Demokrasi dan Keterwakilan Perempuan terhadap FDI (Yurioputra, 2022).

Dalam kerangka teori, demokrasi dan keterwakilan perempuan di parlemen dipandang dapat memperkuat iklim investasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif. Demokrasi yang didukung institusi kuat, kebebasan pers, dan penegakan hukum yang konsisten menurunkan risiko ketidakpastian kebijakan dan korupsi, sehingga memberi sinyal keamanan bagi investor asing (Nurmeyli & Bastam, 2023). Keterwakilan perempuan di parlemen juga diasosiasikan dengan perhatian lebih besar pada kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok

rentan, yang dalam jangka panjang meningkatkan kualitas modal manusia dan reputasi institusional negara di mata penanam modal.

Dalam perspektif investor, kombinasi demokrasi yang stabil dan meningkatnya keterwakilan perempuan dapat menjadi indikator komitmen negara terhadap prinsip non-diskriminasi, tata kelola yang lebih bersih, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut berpotensi menarik FDI yang berorientasi jangka panjang karena investor menilai lingkungan politik lebih dapat diprediksi dan ramah terhadap reformasi struktural. Namun, pengaruh ini sangat bergantung pada konteks; di negara dengan korupsi tinggi dan demokrasi yang masih prosedural, keberadaan perempuan di parlemen bisa terkooptasi sehingga tidak otomatis meningkatkan kualitas kebijakan atau kepercayaan investor (Al Fatih et al., 2024).

Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap FDI

Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model (REM), variabel ekonomi menunjukkan arah pengaruh yang lebih dominan terhadap Foreign Direct Investment (FDI) dibandingkan variabel politik seperti demokrasi dan keterwakilan perempuan. Variabel PDRB sektor pertambangan dan upah minimum provinsi memiliki arah hubungan positif terhadap FDI, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan arah hubungan negatif terhadap FDI. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi daerah, terutama kapasitas produksi berbasis sumber daya alam, kondisi pasar tenaga kerja, dan tingkat upah, masih menjadi pertimbangan penting bagi investor asing dalam menentukan keputusan investasi di Indonesia (Indriani, 2016).

PDRB pertambangan yang tinggi mengindikasikan besarnya potensi dan aktivitas ekonomi di sektor sumber daya, sehingga menarik bagi FDI yang berorientasi pada pemanfaatan komoditas dan industri ekstraktif. Upah minimum provinsi yang lebih tinggi, selama sejalan dengan produktivitas, dapat memberi sinyal stabilitas sosial-ekonomi dan pasar domestik yang kuat, sehingga FDI tidak hanya mengejar biaya tenaga kerja murah tetapi juga prospek permintaan dan kualitas tenaga kerja. Sebaliknya, TPT yang tinggi diinterpretasikan sebagai indikator ketidakpastian pasar kerja dan lemahnya penyerapan tenaga kerja, sehingga menurunkan daya tarik suatu wilayah bagi investor asing karena mengindikasikan risiko struktural dalam perekonomian (Pahlevi & Rahim, 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh demokrasi, keterwakilan perempuan, dan faktor ekonomi terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia menggunakan pendekatan data panel dengan model Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil analisis, variabel demokrasi dan keterwakilan perempuan di legislatif menunjukkan arah pengaruh positif terhadap FDI, sedangkan kepemimpinan perempuan menunjukkan arah pengaruh negatif. Namun demikian, variabel politik tersebut belum menunjukkan pengaruh yang dominan terhadap arus investasi asing di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor representasi politik dan kualitas demokrasi belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama investor asing dalam menentukan keputusan investasi pada tingkat provinsi di Indonesia.

Di sisi lain, faktor ekonomi menunjukkan pengaruh yang lebih besar terhadap FDI. Variabel PDRB memiliki pengaruh positif terhadap investasi asing, sedangkan tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi, dan PDRB sektor pertambangan menunjukkan arah pengaruh negatif terhadap FDI. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi FDI masih terbatas sehingga terdapat

faktor lain di luar model yang turut memengaruhi investasi asing di Indonesia. Meskipun demikian, hasil uji simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap FDI, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai keterkaitan faktor politik dan ekonomi terhadap arus investasi asing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2022). Transparansi pelaporan dana kampanye peserta pemilihan tahun 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.172>
- Al Fatih, I. Z., Putera, R. A., & Umar, Z. H. (2024). Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10090>
- Alisya, J., Charolin, A., & Lubis, P. K. D. (2024). Kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi nasional: Analisis dan strategi. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2), 811. <https://doi.org/10.57235/hemat.v1i2.2832>
- Effendi, P., & Ratnasari, D. (2018). Kesetaraan gender dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2). <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.701>
- Engelica, H., Wulansari, A. R., Muthoharoh, F., Azzahra, F. F., Istiqomah, N., & Cantikasari, S. (2025). (Engelica, H., Wulansari, A. R., Muthoharoh, F., Azzahra, F. F., Istiqomah, N., & Cantikasari, S. 2025). *Journal of Economic Resilience and Sustainable Development*, 2(1), 15–29. <https://doi.org/10.61511/ersud.v2i1.2025.1400>
- Gaffar, M. J. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press.
- Indriani, M. (2016). Peran tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Gema Keadilan*, 3(1), 74–85. <https://doi.org/10.14710/gk.2016.3644>
- Kartasasmita, G. (2025). *Mengoptimalkan peran perempuan dalam politik dan korporasi: Langkah menuju kesetaraan gender yang lebih adil*. <https://doi.org/darihttps://teropongsenayan.com/134205-mengoptimalkan-peran-perempuan-dalam-politik-dan-korporasi-langkah-menusju-kesetaraan-gender-yang-lebih-adil>
- Kementerian Investasi/BPKM. (2022). *Realisasi investasi triwulan IV dan Januari–Desember tahun 2022*. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/realisasi-investasi-triwulan-iv-dan-januari-desember-tahun-2022>
- Ningsih, S. R. (2024). Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i1.341>
- Nuraeni, Y., & Lilin Suryono, I. (2021). Analysis of gender equality on employment in Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Nurmeyli, R., & Bastam, M. N. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja konstruksi: Tinjauan literatur. *Jurnal Teknik Sipil UNPAL*, 13(1), 53. <https://doi.org/10.36546/tekniksipil.v13i1.965>
- Olivia, Y., & Nuraeni, N. (2024). Representasi perempuan di parlemen dan legislasi isu lingkungan hidup: Studi kasus undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 1(1), 141–156. <https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.7835.141-156>

- Pahlevi, R., & Rahim, R. A. A. (2023). Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(2), 259–268. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.26766>
- Putriyanti, E. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung di Indonesia 1986-2019 (Analysis of Factors Affecting Foreign Direct Investment in Indonesia 1986-2019). *Jurnal Economina*, 1(3), 620–633.
- Septiantoro, A. A., Hasanah, H., Alexandi, M. F., & Nugraheni, S. R. W. (2020). Apakah Kualitas Institusi Berpengaruh pada Arus Masuk FDI di ASEAN? *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 5. <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol20/iss2/5/>
- Winahyu, P., & Reskiputri, T. (2023). Apakah persepsi kesetaraan gender dan motivasi berprestasi dapat meningkatkan perencanaan karir dan kinerja pegawai? *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.24269/asset.v6i2.8144>
- Yurioputra, A. D. (2022). Impact of foreign direct investment of Indonesia investment authority on economic growth: strengthening national economic recovery to overcome global recession in 2023. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 404–413. <https://doi.org/https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1920>